

# **PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PALOPO**

**Nurhayani<sup>1</sup>**  
**Halim Usman<sup>2</sup>**  
**Sri Wahyuni Mustafa<sup>3</sup>**

Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Palopo  
[nurhayaniapril@gmail.com](mailto:nurhayaniapril@gmail.com)

## **ABSTRACK**

*This study aims to determine the effect of internal audit on the implementation of good corporate governance. In determining good corporate governance, there are 5 main principles, namely: transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The method of data collection is done by distributing questionnaires which are distributed directly to the employees of PT. Pegadaian (Persero) Palopo Branch. The population in this study were all employees of PT. Pegadaian (Persero) Palopo Branch and the sampling technique used purposive sampling with a total of 48 respondents. The data analysis technique used is simple linear regression analysis. Based on the results of simple linear regression analysis shows that internal audit has a positive and significant effect on the implementation of good corporate governance at PT. Pegadaian (Persero) Palopo Branch, which means the more effective the internal audit, the better the internal audit for the implementation of good corporate governance.*

**Keywords:** *Internal Audit, Good Corporate Governance*

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*. Dalam penetapan *good corporate governance* terdapat 5 prinsip utama yaitu : keterbukaan (*transparansi*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Metode pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang disebarakan langsung kepada karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan total 48 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo, yang artinya semakin efektif audit internal, semakin baik audit internal untuk penerapan *good corporate governance*.

**Kata Kunci:** Audit Internal, *Good Corporate Governance*

## 1. PENDAHULUAN

Perusahaan publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia wajib memiliki unit audit internal untuk membantu memastikan sistem pengendalian internal. Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bersifat umum. Setiap perusahaan di Indonesia harus memiliki fungsi pengendalian internal yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang andal dan bertugas membantu direksi untuk memastikan tercapainya tujuan dan kelangsungan usaha dengan cara menilai kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia wajib memiliki unit audit internal untuk membantu memastikan sistem pengendalian internal. Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bersifat umum. Setiap perusahaan di Indonesia harus memiliki fungsi pengendalian internal yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang andal dan bertugas membantu direksi untuk memastikan tercapainya tujuan dan kelangsungan usaha dengan cara menilai kinerja perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penyelenggaraan *Good Corporate Governance* (GCG) mensyaratkan 5 prinsip dasar, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Apabila proses dan mekanisme diimplementasikan dengan baik, maka pengelolaan perusahaan akan berjalan sehat (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011, 2011).

Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa gadai namun demikian, tidak serta merta membatasi diri pada jasa gadai, seperti tanggung jawab atas barang yang digadaikan, termasuk risiko kehilangan atau kerusakan barang yang digadaikan.

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo merupakan usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan non perbankan yang beroperasi dan memiliki beberapa UPC di Kota Palopo. Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberadaan Perum Pegadaian juga membantu mencegah terjadinya praktek ijon, pegadaian ilegal, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Uang pinjaman didistribusikan dengan cara yang sederhana, cepat, aman, dan hemat biaya (Fikri Keso, 2019:34).

Semakin meningkatnya jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perkreditan dan cara pengambilan kreditnya juga jauh lebih mudah dibandingkan perum pegadaian yang tentunya menimbulkan persaingan. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip GCG sangat dibutuhkan dalam Perum Pegadaian.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*agency theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dalam Hamdani (2016) bahwa dalam memahami isu *corporate governance* digunakan persektif teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan (*teori agency*) adalah suatu interaksi yang menurut dalam kontrak yang terjadi antara pemilik dan agen menjadi pelaku utama.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori keagenan (*agency theory*) mendapat respon yang lebih luas karena dipandang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Banyak refleksi tata kelola perusahaan telah dikembangkan berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), di mana semua kegiatan manajemen dilakukan sepenuhnya sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

### **2.2 Audit Internal**

Menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA), seperti dikutip oleh Patricia Saptapradipta adalah kegiatan independen, jaminan objektif dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuan bisnis dengan cara pendekatan yang sistematis, dan disiplin untuk menilai dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, manajemen dan proses tata kelola (Ardi, 2017:171).

#### **2.2.1 Audit Internal Yang Efektif**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, memerlukan departemen audit internal yang sangat efektif. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memiliki departemen audit internal yang efektif yang mendukung manajemen dengan memberikan analisis, evaluasi, dan saran atas kegiatan yang diselidiki perusahaan (Erniwati, 2018:8).

- 1) Departemen audit internal harus memiliki posisi independen dalam organisasi bisnis, yaitu tidak berpartisipasi dalam kegiatan profesional yang diaudit oleh departemen tersebut.
- 2) Departemen audit internal harus memiliki uraian tugas tertulis yang jelas sehingga departemen tersebut dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Departemen audit internal juga harus memiliki manual audit internal yang berguna untuk:
  - a. Mencegah kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Menetapkan standar untuk mengukur dan meningkatkan kinerja;
  - c. Memberikan jaminan bahwa hasil akhir fungsi audit internal konsisten dengan persyaratan audit internal.
- 3) Departemen audit internal membutuhkan dukungan manajemen senior yang kuat. Dukungan manajemen yang kuat meliputi:
  - a. Menempatkan departemen audit internal pada posisi independen;
  - b. Mengatur staf audit internal dengan gaji yang wajar;

- c. Berikan waktu yang cukup bagi manajemen senior untuk membaca, mendengarkan, dan mempelajari laporan yang disiapkan oleh departemen audit internal dan menanggapi dengan cepat dan tegas proposal perbaikan yang diusulkan.
- 4) Departemen audit internal harus memiliki sumber daya profesional, kompetensi, objektivitas, integritas dan loyalitas.
- 5) Jasa audit internal harus bekerja sama dengan akuntan publik.
- 6) Perlu adanya rotasi dan pengunduran diri pegawai departemen audit internal.
- 7) Memberikan hukuman yang berat kepada pegawai yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- 8) Tetapkan kebijakan yang solid tentang hadiah eksternal.
- 9) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai auditor internal.

### **2.2.2 Standar Profesional Audit Internal**

Dalam penelitian Agum (2019:11), agar terciptanya audit internal yang baik maka perlu dipenuhi suatu kriteria atau standar. Berikut merupakan standar profesional audit internal sebagai berikut:

#### 1) Independensi

Audit internal harus independen dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap independen jika dapat melakukan tugasnya secara independen dan objektif. Auditor internal penting terutama dalam memberikan audit yang tidak bias (netral). Hal ini hanya dapat dicapai melalui organisasi unit audit internal, yang akan memberikan auditor internal fleksibilitas yang dibutuhkan untuk mengambil tanggungjawab penilaian.

#### 2) Kemampuan Profesional

Audit internal harus dilakukan dengan ketelitian dan memiliki sikap profesional yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Dalam setiap audit, Kepala Audit Internal harus menugaskan orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai di berbagai bidang seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, IT, elektronik, perpajakan, dan persyaratan hukum untuk melakukan audit. Periksa dengan benar dan akurat. Tim manajemen audit internal harus dapat memastikan atau memastikan bahwa pelatihan auditor internal secara teknis sesuai dengan jenis audit yang dilakukan, namun setiap anggota audit auditor internal tidak perlu memiliki kualifikasi dalam semua ini.

#### 3) Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup pengujian dan evaluasi kecukupan dan efektivitas system pengendalian organisasi. Tujuan meninjau untuk kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yaitu untuk menentukan apakah system yang diterapkan dapat memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan organisasi dan target dapat dicapai secara efisien dan ekonomi, dan memeriksa bahwa sistem berjalan sesuai harapan. Tujuan utama pengendalian internal adalah untuk

memastikan: (1) keakuratan informasi; (2) mematuhi berbagai kebijakan, rencana, prosedur dan persyaratan hukum; (3) melindungi asset organisasi; (4) penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien); (5) pencapaian berbagai tujuan dan sasaran.

#### 4) Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan dan penilaian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, dan pemantauan hasil pemeriksaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas audit. Perencanaan audit internal harus didokumentasikan dan mencakup: (1) mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup audit; (2) memperoleh informasi dasar tentang pokok bahasan yang akan diteliti; (3) menentukan personel yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian; (4) pemeriksaan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu; (5) melakukan survei yang sesuai dan menentukan area atau area yang akan disurvei; (6) menentukan program pemeriksaan; (7) menentukan bagaimana dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan dikomunikasikan dan; (8) memiliki rencana kerja inspeksi yang disetujui.

### 2.2.3 Tujuan Audit Internal

Dalam upaya menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan, serta memenuhi peraturan perundang-undangan, dewan direksi perlu menyusun dan menjalankan system pengendalian internal yang baik. Fungsi supervise internal bertugas membantu direksi dalam memastikan tercapainya tujuan dan kelangsungan bisnis dengan:

- a. Melaksanakan penilaian atas program perusahaan
- b. Memberikan saran untuk memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko
- c. Melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG & perundang-undangan
- d. Program audit di falisitasi oleh audit eksternal demi kelancaran program

Tujuan audit internal adalah guna membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Agar tujuan tercapai, maka staf audit internal dibutuhkan agar dapat terpenuhi dengan menggunakan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi aktivitas yang telah dilakukan (Suginam, 2017:24).

### 2.2.4 Fungsi Audit Internal

Dalam penelitian Cahyani (2020:108) Menurut *International of Internal Auditor* (IIA) fungsi audit internal pada perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Membantu dalam melindungi asset serta meminimalisir kemungkinan adanya tindakan kecurangan.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasi perusahaan.
3. Meningkatkan keandalan dan integritas keuangan perusahaan.
4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
5. Menetapkan prosedur monitoring.

Adapun menurut Mulyadi dalam Ardi (2017:171) Fungsi audit internal adalah penilaian independen dalam suatu organisasi yang dilakukan dengan memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain yang memberikan layanan kepada manajemen dalam melaksanakan audit yang menjadi tanggung jawabnya.

### **2.2.5 Ruang Lingkup Audit Internal**

Ruang lingkup audit internal mencakup pemeriksaan dan penilaian kepatuhan. Efektivitas system pengendalian internal organisasi dan kualitas tanggungjawab dan tugasnya. Ruang lingkup audit internal menurut Tugiman (2003, hal. 99-100) dalam ( et al., 2019:28) :

1. Verifikasi keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional yang digunakan dan alat identifikasi, ukur, klarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Meninjau sistem yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan peraturan yang mungkin berdampak signifikan pada operasi dan pelaporan, dan memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Mempertimbangkan berbagai metode untuk melindungi aset dan mengonfirmasi keberadaan produk jika perlu.
4. Mengevaluasi efisiensi ekonomi dan efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Tinjauan operasi atau program untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang dinyatakan dan bahwa operasi atau program berjalan sesuai rencana.

### **2.2.6 Siklus Kerja Audit Internal**

Secara umum siklus utama internal audit dapat dibagi menjadi 4 tahapan besar dalam penelitian (Agum, 2019:19) menyebutkan sebagai “Audit P-E-D-E ” yaitu:

1) PLAN: rencana audit (audit “*plan*”)

Ini merupakan upaya untuk menerjemahkan strategi/bisnis perusahaan dan pemberian umpan balik. Dari perspektif audit internal, yaitu pemetaan risiko, manajemen, dan keputusan strategi audit hingga pembuat program mengaudit.

2) DO: pelaksanaan audit (audit “*execution*”)

Adalah pelaksanaan rencana audit, baik secara berkala (audit berkelanjutan) atau atas dasar penyelidikan khusus atau permintaan dari pihak tertentu (terutama audit). Keduanya dilakukan secara sinkron antara pemantauan tidak langsung (on-site audit) dan pemantauan langsung (on-site audit). Dengan audit berlangsung, pengembangan audit database juga merupakan bagian penting dari fase ini

3) CHECK: penyajian hasil audit (audit “*deliverables*”)

Merupakan mempresentasikan hasil audit (“produk audit”) audit (laporan audit) kepada auditee dan pihak yang berkepentingan. Auditee harus menanggapi baik konfirmasi temuan maupun pelaporan hasil audit sebagai fungsi verifikasi ulang.

4) ACT: peninjauan kembali hasil audit (audit “*evaluation*”)

Merupakan kegiatan penilaian (review) yang memiliki dua aspek: pertama, mengevaluasi hasil penilaian lanjutan yang harus dilakukan auditee. Kedua, penilaian komprehensif atas kecukupan manajemen risiko dan pengendalian internal di seluruh grup serta review internal atas kinerja audit sepanjang tahun. Hasil kajian komprehensif akan digunakan untuk tahap perencanaan audit mendatang.

### **2.2.7 Wewenang dan Tanggungjawab Audit Internal**

Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) dalam (Wulandari, 2017:4), mengungkapkan bahwa “Tujuan, wewenang dan tanggungjawab fungsi audit internal harus ditetapkan secara formal dalam piagam audit internal dan disetujui oleh pimpinan organisasi dan dewan direksi, berdasarkan standar professional audit internal”. Harus mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab audit internal yang dinyatakan dalam dokumentasi resmi. Sedangkan dalam standar profesi akuntan bersertifikat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001:3221) merinci tanggungjawab audit internal. Memberitahukan kepada manajemen unit dan direksi atau pemangku kepentingan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab. Audit internal menjaga objektivitasnya terhadap kegiatan yang akan di audit. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang dan tanggungjawab terhadap internal audit adalah sebagai berikut: (1) Kode etik diterapkan untuk mencapai tujuan perusahaan; (2) Audit internal bertanggungjawab untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen senior dan dewan direksi departemen audit internal. Dan perlu dicatat bahwa departemen audit internal tidak memiliki wewenang atau tanggungjawab atas kegiatan yang sedang diselidiki.

### **2.3 Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* (GCG) menjadi topik yang menarik di era teknologi saat ini. Hal ini karena meminta organisasi untuk lebih efisien dan untuk melakukan tugasnya lebih efektif.

*Good Corporate Governanace* (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan ketidakberpihakan. Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan:

- 1) Struktur yang mengatur pola hubungan yang wajar dengan dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (*stakholder*) lainnya
- 2) Sistem yang memeriksadan menyeimbangkan wewenang atas pengelolaan perusahaan. Ini membatasi dua kemungkinan: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset
- 3) Proses yang transparan untuk menentukan tujuan, hasil, dan perusahaan serta mengukur kinerjanya.



### **2.3.1 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance***

Dalam penelitian Nadya & Isfenti (2021:100-101) Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance* Menurut Sutojo dan Aldridge (2005:5), yaitu ada lima jenis tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- 2) Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja direksi dan nilai tata kelola perusahaan.
- 4) Melindungi hak dan kepentingan *stakeholder* lainnya sebagai pemegang saham
- 5) Sekaligus meningkatkan kualitas hubungan antara dewan direksi dari perusahaan dan manajemen senior.

Sedangkan menurut Daniri (2006: 15-16), manfaat penerapan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan monitoring terhadap kinerja manajemen dengan adanya pertanggungjawaban manajemen kepada pihak yang berkepentingan, berdasarkan aturan yang ditetapkan.
- 2) Menyediakan rancangan konsep untuk menciptakan *checks and balances* dalam perusahaan.
- 3) Mengurangi biaya keagenan (*cost agency*), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada dewan direksi.

### **2.3.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Menurut Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG Code) Pegadaian (2017:14-16) Semangat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di lingkungan perusahaan tercermin dalam prinsip GCG yang diakomodasikan dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari perusahaan, dalam hal ini terdiri unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan, mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan serta mematuhi segala peraturan perundang-undang yang berlaku yang telah di atur mengenai masalah keterbukaan informasi.

- 2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas adalah keelasan misi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Akuntabilitas mengacu pada pemenuhan kewajiban dan wewenang individu atau badan untuk memenuhi tanggungjawab yang dibebankan perusahaan. Pertanggungjawaban ini meliputi penjelasan atau pelaksanaan kewajiban dan wewenang, pelaporan pelaksanaan kewajiban dan wewenang, dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang melaksanakan kewajiban dan wewenang.

- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban adalah kepatuhan manajemen perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik bisnis yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

4) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip kemandirian adalah kondisi bahwa perusahaan dikelola secara profesional, tidak memiliki benturan kepentingan atau tekanan dari pihak lain, dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik bisnis yang baik.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam menegakkan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul dari kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3.4 Hubungan Audit Internal dengan *Good Corporate Governance***

Mengenai penerapan *good corporate governance* dapat dijelaskan melalui esensi *good corporate governance* itu sendiri, yang juga berkaitan dengan teori keagenan (*agency theory*). Dalam ekonomi modern, pengelolaan dan pengoperasian bisnis sebagian besar dipisahkan dari kepemilikan bisnis yang sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pemilik bisnis (pemegang saham) dalam transaksi, agen lebih memahami dalam mengatur urusan sehari-hari. Tujuan pemisahan manajemen dari kepemilikan bisnis adalah agar pemilik bisnis dapat memperoleh keuntungan maksimum dengan cara yang paling hemat biaya dengan mengelola bisnis oleh karyawan profesional. Mereka adalah pekerja profesional, melayani perusahaan dan dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk memastikan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal ini para profesional bertindak sebagai agen pemegang saham. Agen mendapatkan keuntungan lebih. Sementara itu, pemilik usaha (pemegang saham) bertanggung jawab penuh untuk memantau dan mengendalikan operasi perusahaan yang dijalankan oleh manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan perusahaan (Zarkasyi, 2008:28) dalam penelitian (Kenny, 2015:34).

### **2.3.5 Peranan Auditor Internal dalam *Good Corporate Governance***

Dalam penelitian yang dilakukan Kenny (2015:35) bahwa peran akuntan perusahaan, baik sebagai pengontrol manajemen maupun peran auditor, sangat penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Auditor internal bertanggung jawab untuk mempelajari dan mengevaluasi kinerja sistem akuntansi di samping mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program kerja manajemen dilaksanakan. Auditor internal, sebagai salah satu profesi yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik, kini menjadi faktor utama dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan yang sehat. Auditor internal dapat berperan berikut:

a) Sebagai *Compliance Auditor*

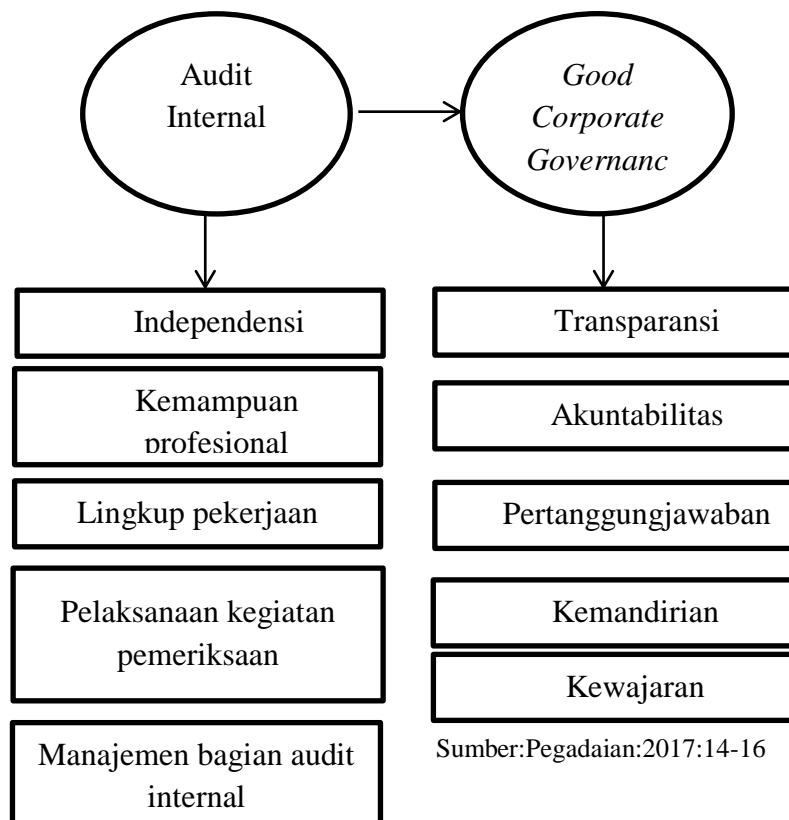
- 1) Bertanggungjawab kepada direktur utama dan akses kepada komite audit,
- 2) Direktur Memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan mekanisme perusahaan,
- 3) Mengevaluasi sistem pengendalian internal dan melaporkan komite audit,

- 4) Mengevaluasi kinerja perusahaan melalui mekanisme audit keuangan dan operasional sebagai konsultan bisnis intern.
- b) Sebagai *Internal Business Consultant*
- 1) Membantu auditor komite audit dalam penilaian risiko dan memberikan saran kepada manajemen,
  - 2) Melakukan fungsi konsultasi dan memastikan kinerja,
  - 3) Meninjau aturan tata kelola perusahaan setidaknya setiap tahun

#### 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan alur pemikiran dan hubungan yang menunjukkan hubungan antara variabel dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini meliputi Audit Internal dan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian diatas dan penjelasan latar belakang, tinjauan pustaka termasuk teori yang dijelaskan sebelumnya dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:

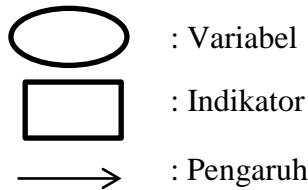


Sumber:Hiro Tugiman:2011:16

Sumber:Pegadaian:2017:14-16

**Gambar 2 .1** Kerangka Konseptual

Keterangan:



## 2.5 Hipotesis

Dalam kaitannya dengan rumusan masalah yang dikemukakan terlebih dahulu maka penulis mencoba mengajukan hipotesis bahwa “Audit Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo”.

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal, dimana terjadi hubungan sebab akibat diantara dua variabel yaitu, variabel dependen dan variabel independen. Desain kausal berguna untuk mengukur hubungan antar variabel atau berguna untuk menganalisis bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran audit internal sebagai variabel independen terhadap penerapan *good corporate governance* sebagai variabel dependen.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo yang beralamat di Jl. Andi Kambo No.43, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sedangkan waktu penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pada bulan Maret-Mei 2022.

Menurut Sugiyono (2013:115) Populasi merupakan bidang umum yang berdasarkan subjek atau subjek yang menggunakan ciri yang diidentifikasi oleh peneliti, untuk dipelajari, diselidiki, kemudian disimpulkan. Adapun populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan pada PT. Pegadaian Se- Kota Palopo yang berjumlah 83 karyawan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono:2011:81). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dari populasi jumlah karyawan yang bekerja di PT. Pegadaian Se-kota Palopo sebanyak 60 orang dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2013:122) *Purposive Sampling* adalah suatu metode penentuan responden yang akan digunakan sebagai sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Divisi audit internal, pimpinan cabang, analis risiko, penaksir, pengelola anggaran, kasir dan BPO/RO
2. Karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun

**Tabel 3.1** Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Kuesioner yang didistribusikan	70	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	10	10%
3	Kuesioner yang kembali	60	60%
4	Kuesioner cacat/tidak dapat diolah	12	12%
4	Kuesioner yang dapat diolah	48	48%

n = sampel yang kembali 48

Responden *rate* =  $\frac{48}{70} \times 100\%$

70

= 68%

Sumber: Data primer yang diolah (2022)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Uji Hipotesis

**Tabel 4.1** Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

$Y = a + bX + e$			
	Coefficient	t – statistik	Sig
Constant	4.669	.747	.459
Audit Internal	.105	8.769	.000

N : 48

R<sup>2</sup> : .626

Adj. R<sup>2</sup> : .618

T<sub>tabel</sub> : 1.678

Variabel dependen adalah GCG dan variabel independen adalah Audit Internal

\*Signifikan pada  $\alpha = 0,05$

Sumber: Data primer yang diolah (output SPSS 26), 2022

Berdasarkan hasil output SPSS 26, maka diperoleh data sebagai berikut:

$$Y = 4.699 + 0,105 X + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear sederhana diatas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstan (a) sebesar 4.699 artinya jika variabel audit internal (X) dianggap konstan maka nilai variabel audit internal bernilai 4.699 persen.

- b. Nilai koefisien regresi X sebesar 0,105 menunjukkan bahwa meningkatnya audit internal sebesar 1 akan meningkatkan penerapan GCG sebesar 0,105 persen.

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0.05. Berdasarkan tabel diatas jika t hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis diterima. Dari hasil perhitungan t hitung sebesar  $8.769 > 1.678$  t tabel dan taraf signifikan  $0.000 < 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Good Corporate Governance*. Sehingga dari hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya terbukti bahwa terdapat pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo.

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model summary dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai R 0.105, dengan R Square 0.626. Nilai R merupakan hubungan antara Audit Internal dan *Good Corporate Government*. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar kualitas model regresi linier yang terbentuk, maka diperhatikan nilai koefisien determinasi (R square) 0.626. Nilai tersebut menunjukkan informasi bahwa 62.6% nilai dari besarnya GCG telah dapat dijelaskan oleh data audit internal. Sedangkan sisanya 37.4% informasi mengenai besarnya GCG belum dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas tersebut.

#### **4.2 Pembahasan**

Perusahaan memanfaatkan kemampuan audit internal untuk memastikan bahwa kinerja manajemen sesuai dengan peraturan yang ada, dengan mempertimbangkan pengendalian secara keseluruhan dan efektivitas pelaksanaan proses bisnis yang konsisten. Oleh karena itu, peran audit internal sangat penting bagi praktik GCG, karena memastikan akses pendanaan, dukungan investasi, dan aktivitas bisnis di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo. GCG juga menawarkan banyak manfaat untuk menjadikan sumber daya perusahaan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menguji pengaruh audit internal terhadap penerapan GCG pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo dengan Hipotesis : Di duga Audit Internal Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Penerapan GCG. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis korelasi (R) sebesar 0,836, bahwa terjadi hubungan yang baik antara audit internal terhadap penerapan GCG. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebelumnya dapat diterima, dengan nilai koefisien determinasi (R square) diperoleh angka 0,626 hal ini menunjukkan 62,6% nilai dari besarnya GCG telah dapat dijelaskan oleh data audit internal. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Dari uji t diketahui bahwa Audit Internal berpengaruh terhadap penerapan GCG. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t hitung sebesar 8.769 sedangkan t tabel adalah 1.678 pada taraf signifikan 5% atau 0.05 yang berarti bahwa hipotesis diterima.

Nilai konstanta pada persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik sebesar 4.669, artinya jika Audit Internal mengalami kenaikan 1, maka GCG mengalami penurunan sebesar 0,105. Koefisien berarti signifikansi antara variabel Audit Internal dengan variabel GCG, semakin tinggi fungsi audit internal maka semakin baik penerapan GCG pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya pengaruh audit internal terhadap penerapan GCG juga dibuktikan dalam penelitian Ernawati (2018) dan Agum (2019). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *good corporate governance*.

Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan uji statistik dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan audit internal terhadap penerapan GCG yang ditunjukkan dengan angka signifikan  $0,000 < 0,05$  pada tabel diatas. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan di atas, maka hipotesis yang di ajukan sebelumnya dapat diterima. Artinya audit internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha perusahaan, keberadaan departemen audit internal yang efektif sangat penting. 5 Standar Audit Internal Hiro Tugiman (2011) adalah: independensi, kompetensi profesional, pelaksanaan program audit internal, ruang lingkup pekerjaan dan manajemen bagian audit internal. Pengendalian internal dapat membantu pemerintah mengurangi munculnya kelemahan, kesalahan, dan risiko penipuan. Diharapkan rancangan pengendalian internal di setiap lingkungan instansi pemerintah mampu memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. adap hukum sehingga *good corporate governance* dapat terwujud.

Salah satu unsur terpenting dalam *good corporate governance* di lingkungan perusahaan tercermin dalam prinsip-prinsip: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Agar tercapainya unsur tersebut *good corporate governance* memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib yang harus dianut oleh top management dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalamnya. Dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti, mengevaluasi suatu sistem akuntansi, serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Manajemen departemen audit internal bertanggung jawab atas semua tugas audit internal. Jika semua indikator tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka peran audit internal dapat berjalan dengan efektif.

Dengan manajemen audit internal yang baik, ia akan mampu menghasilkan laporan audit yang andal. Dalam kaitan ini, audit yang dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku dapat meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pada prinsip transparansi, tampak adanya keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan

dalam penyajian informasi penting dan relevan tentang perusahaan. Transparansi mengacu pada kualitas informasi yang dikirimkan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan bergantung pada kualitas informasi yang dikirimkan perusahaan. Akibatnya, perusahaan dipaksa untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, terkini, dan dapat dibandingkan dengan metrik serupa. Penyajian informasi kepada publik secara terbuka, akurat, andal, dan tepat waktu memudahkan dalam menilai operasional perusahaan dan risiko yang dihadapinya. Jika kita berpegang pada prinsip akuntabilitas, kita menemukan bahwa kejelasan operasi, kinerja dan tanggung jawab rapat umum pemegang saham, auditor atau dewan pengawas, manajemen dan pemilik modal untuk menjalankan bisnis dilakukan secara efisien dan efektif. Tanggung jawab menyangkut adanya suatu sistem untuk mengendalikan hubungan antara badan-badan perusahaan dan merupakan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta hak-hak pengendalian atas perusahaan yang dikendalikan oleh auditor. Akuntabilitas dapat dicapai dengan mendorong semua bagian bisnis untuk menyadari tanggung jawab, wewenang, dan hak mereka.

Menerapkan transparansi dan akuntabilitas di perusahaan akan membantu perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik, tetapi untuk tiga prinsip akuntabilitas lainnya, independensi dan kewajaran juga harus diterapkan dalam implementasi GCG di perusahaan. Sesuai pasal 3 Keputusan Menteri BUMN No. Kep117/MMBU/2002 terkait prinsip-prinsip GCG. Selain itu, untuk berhasil menerapkan GCG diperlukan adanya faktor eksternal dan internal perusahaan seperti adanya sistem hukum yang baik, adanya dukungan dari pemerintah, perusahaan, masyarakat dan adanya peraturan atau kebijakan perusahaan terkait dengan aplikasi prinsip-prinsip GCG.

Dengan tercapainya tata kelola perusahaan yang baik, maka keputusan penting perusahaan tidak lagi diputuskan hanya oleh satu pihak yang dominan, tetapi ditentukan setelah mendapat masukan dari semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (pihak terkait). Selanjutnya tata kelola perusahaan dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, akuntabel dan transparan serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Dengan demikian, penerapan audit internal berpengaruh positif dan signifikan dalam pencapaian tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan. Semakin efektif dan lengkap audit internal, semakin baik audit internal untuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

## **5. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan pengaruh audit internal terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo, dengan melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo dengan bebrapa kriteria tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerapan *good corporate governance*. Hal ini bias dilihat dari adanya perbedaan t



hitung dengan t tabel pada analisis sebelumnya, dimana terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*.

Signifikansi pengaruh audit internal terhadap *penerapan good corporate governance* ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dengan nilai signifikansi t hitung sebesar 8.769 lebih besar dari > t tabel sebesar 1.678, sehingga dapat disimpulkan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo.

### **5.1 Keterbatasan**

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini masih perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen saja.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga terdapat kemungkinan adanya kelemahan yang ditemui seperti responden yang menjawab asal-asalan, tidak serius, maupun adanya pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden.

#### **a. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, saran dan rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan kepada perusahaan adalah agar lebih meningkatkan audit internal sehingga kinerja bagian audit internal lebih baik lagi, program kerja audit pun harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan agar tetap mempertahankan penerapan *good corporate governance* sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.
2. Untuk pengujian yang lebih mendalam dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih signifikan. Sebaiknya dilakukan lebih dari satu perusahaan BUMN dan menambah variabel-variabel selain dari pada audit internal yang dapat mempengaruhi pada *good corporate governance*. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi dari hasil penelitian.

#### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan artikel ini, baik dukungan dalam bentuk material maupun nonmaterial.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agum, M. (2019). Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Di PT Asuransi Kredit Indonesia Kota Makassar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 126(1), 1–7.
- Ardi, M. (2017). Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* Di Perbankan Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 169–176.
- Cahyani, A. M. et. (2020). Pengaruh Internal Audit Dan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pt Bumi Karsa Makassar. *Economics Bosowa Jpurnal Edisi Xxxv Juli s/d September 2020*, 6(16), 20–30.
- Erniwati, A. (2018). Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Pt. Bank Sulselbar Kota Makassar. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24–36.
- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Fikri Keso, G. (2019). *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 11/Nov/2019. VII(11)*, 34.
- Hamdani, M. (2016). *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory. Semnas Fekon*, 279–283.
- Kenny, A. (2015). Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Maryana, D., & Hasibuan, N. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Gcg) Pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 10–17.
- Niscon Simanjuntak, D. (2018). Pengaruh Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance* Pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. *In Search*, 17(01), 14–25.
- Nugroho D.P (2010). Pelaksanaan Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada Sektor Publik.
- Pegadaian. (2017). *Pedoman Good Corporate Governance ( GCG Code ) PT*

- Pegadaian ( Persero )*. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011. (2011). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. (*Per—01/Mbu 2011*), 1–19.
- Pratama, A. J. dkk. (2017). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada (PT. Mulia Industrindo Tbk Cikarang). *Universitas Sumatera Utara Medan*, 1–13.
- Pratiwi, I., & Ratnaningsih, R. (2020). Pengaruh Peran Komite Audit dan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Pt . Pindad ( Persero ). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–22.
- Putri, A. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal dan Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance* ( Studi Pada BUMN yang Berkantor Pusat di Bandung ). *Economics Professional in Action (E-Profi)*, 2(02), 80.
- Sabrina Nurul Nadya & Sadalia, I. (2021). Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Penjaminan (Studi Kasus PT. Jamkrindo). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 1(1), 100–101.
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal, Kontrol, Audit Internal dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kecurangan ( *FRAUD* ) perbankan ( Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan ). *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 48–55.
- Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wulan, W., Ikhsan, K. N., & Rosdiana, N. (2017). Pengaruh Audit Internal Terhadap *Good Corporate Governance* Pada Rumah Sakit. *Media Informasi*, 13(1), 1–5.
- Wulandari, T. (2017). Peranan Audit Internal Terhadap Kepatuhan Standar Operasional Prosedur (Sop) Pada PT. Penerbit Erlangga Cabang Surabaya. *Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6, 15.